

AFRIKA BERGOLAK TERUS

O. ABDUL RACHMAN

I. Perubahan Politik Portugal dan Implikasinya

Peristiwa pada bulan April 1974 di Portugal, yang merupakan suatu coup tak-berdarah, telah menggulingkan pemerintah konservatif di bawah Perdana Menteri Caetano dan digantikan oleh sebuah pemerintah baru dengan Jendral Spínola sebagai Presiden pertama. Pada waktu itu, Presiden Spínola memperkenalkan "Junta of National Salvation" yang terdiri dari Spínola sebagai ketua, Jendral Gomez, tiga Jendral Angkatan Darat dan dua Komodor dari Angkatan Laut sebagai anggota. Motivasi Junta antara lain adalah: "to restore fundamental rights; elections for a representative legislature will be held within one year; the African wars would be ended in such a way as to guarantee the survival of the nation as a sovereign country in its multi-continental entity".

Coup bulan April 1974 tersebut mengakhiri pemerintah kediktatoran rezim Salazar dan Caetano yang selama lima puluh tahun ini menguasai Portugal. Berlainan dengan rezim kediktatoran di Spanyol dan di Yunani yang dapat memperkembangkan kemakmuran rakyat, di Portugal Salazar dan Caetano, walaupun didukung oleh elite yang kaya, hanya berusaha menutup perbatasan-perbatasan Portugal terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial yang telah membawa kemakmuran di negara-negara lain di Eropa Barat, terutama sejak Perang Dunia II. Sebagai anggota NATO, Portugal memang mendapat penghasilan karena Amerika Serikat menyewa beberapa pangkalan Angkatan Udara di kepulauan Azores; akan tetapi ekonomi dalam negeri tidak berkembang, yang mengakibatkan bahwa banyak warga Portugal mencari rezeki di negara-negara Eropa Barat sebagai "gast-arbeiter". Penghasilan pekerja-pekerja Portugal yang dikirinkan kembali ke keluarga-keluarganya, merupakan devisa yang melibihi pendapatan dari bidang tourisme. Lalu lintas pekerja-pekerja Portugal ke negara-negara Eropa Barat lainnya, ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman pasukan-pasukan Portugal yang dalam rangka NATO berdinasi di Eropa Barat, menggairahkan kondisi mental sementara orang Portugal sehingga mereka dapat membandingkan keadaan terbelakang Portugal dengan kemajuan-kemajuan bangsa-bangsa lain di Eropa Barat.

Dengan pengawasan ketat oleh Dinas Rahasia yang terkenal dengan nama D.G.S., bertahun-tahun Portugal menutup pemberitaan tentang oposisi dalam negeri, baik di kalangan cendekiawan, di kalangan mahasiswa-mahasiswa, maupun di kalangan rakyat banyak, baik pekerja maupun tani.

Akan tetapi pada tahun 1961 terjadilah tiga peristiwa yang merupakan permulaan dari keruntuhan kediktatoran Portugal. Pada tahun 1961, daerah Portugal di Goa diduduki oleh India, tanpa perlawanan dari tentara Portugal. Tentara ini kemudian dikembalikan. Dapat dimengerti bahwa pasukan-pasukan Portugal tadi membawa mobil yang sangat rendah. Pada tahun 1961 itu juga terjadi pembajakan kapal penumpang serba lux, Santa Maria, oleh seorang kapten kapal, sebagai pertanda protes terhadap Salazar. Juga pada tahun 1961 melotus pemberontakan bersenjata di Angola, yang kemudian disusul dengan pemberontakan-pemberontakan di Guinea Bissau (1963) dan di Mozambik (1964). Kondisi mental rakyat Portugal sedianya dipupuk oleh pemerintahnya dengan anggapan bahwa orang-orang Afrika "berang" dengan pemerintah Portugal. Tidak mengherankan bahwa perang kolonial Portugal yang tidak dapat menumpas pemberontakan-pemberontakan orang Afrika akhirnya telah menimbulkan kekecewaan dan mengakibatkan kondisi "battle fatigue" di antara orang Portugal.

Rumusan motivasi Junta yang diumumkan oleh Spinoza, memang bersifat radikal bila dibanding dengan rezim Caetano. Akan tetapi dalam rumus-rumus tadi masih tercakup cita-cita Portugal agar hubungan antara daerah-daerah koloni dengan Portugal masih dapat dipelihara dalam bentuk "Lusitanian Community", dengan bekas daerah-daerah Portugal Seberang Lautan diberi otonomi luas dan "suara" di Lisbon untuk turut menentukan policy Community.

Perkembangan sejak bulan April menunjukkan bahwa policy Spinoza dalam pelaksanaannya ketinggalan dengan kenyataan-kenyataan baik di Portugal, maupun di daerah-daerah Seberang Lautan. Penghidupan politik terbuka di Portugal telah memungkinkan Partai Komunis Portugal untuk memegang peranan, terutama di kota-kota. Lain daripada itu ternyata bahwa Junta yang terdiri dari Jendral-jendral dan Komodor-komodor Angkatan Laut itu kalah kuat dengan sekelompok opsir-opsir muda yang berpangkat kapten dan mayor, yang pada akhir bulan Oktober 1974 berhasil menggantikan Spinoza dengan Jendral Gomez, sedangkan Perdana Menteri Goncalves tetap berkuasa. Politik pemerintah Goncalves lebih mengarah ke kiri, mungkin untuk mendamaikan arus komunisme dalam menghadapi pemilihan umum pada tahun 1975 seperti dijanjikan.

Proses dekolonisasi rupanya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu, artinya akhir tahun 1975 semua persoalan dekolonisasi sudah selesai. Hal ini antara lain akan menimbulkan persoalan tentang repatriasi ribuan orang Portugal putih dari Afrika ditambah lagi dengan ribuan tentara yang harus ditarik kembali. Akan timbul persoalan mengenai perkembangan ekonomi terutama di Angola dan Mozambik, yang tadinya membawa devisa untuk Portugal: apakah Angola merdeka dan Mozambik merdeka masih akan membawa manfaat untuk Portugal yang miskin?

Prospek dekolonisasi Portugal pasti akan membawa akibat dalamimbangan kekuatan di Afrika, sementara untuk Portugal sendiri prospek untuk waktu yang akan datang juga tidak kelihatan mantap.

II. Sedikit gambaran tentang: Guinea Bissau, Mozambik, Angola

GUINEA BISSAU terletak di Afrika Barat. Negara kecil dengan penduduk berjumlah 550.000 pada sensus 1969. Penghasilan utama adalah dari pertanian. Perang kemerdekaan yang sangat gigih, memaksa Portugal untuk menempatkan 30.000 tentara. Di bidang ekonomi Guinea Bissau memperlihatkan neraca perdagangan yang negatif, dengan import sebanyak 580.000 contos¹ sedangkan export hanya 85.000 contos. Komodities yang diekport pada tahun 1968 adalah kacang tanah dan minyak kelapa sawit, masing-masing merupakan 60 dan 30% dari jumlah export seluruhnya. Terdapat juga bauksit dan minyak, akan tetapi karena kondisi perang ekonomi tidak dapat dikembangkan.

MOZAMBIK di Afrika Timur merupakan daerah Portugal di Afrika yang luasnya 784.961 km persegi dengan penduduk menurut sensus tahun 1968, sejumlah 6.603.653, yang terbagi dalam 97.245 kulit putih, 21.000 orang Cina, 17.000 orang keturunan India dan Pakistan, 31.000 orang Mestizo, 2.500 orang kulit putih dari Afrika Selatan dan Inggris dan 6.500.000 orang Afrika.

80% penduduk bekerja dalam sektor pertanian, 80% barang ekspor adalah hasil pertanian dan perkebunan. Iklim di Mozambik lebih baik daripada iklim di Angola. Di Mozambik terdapat pertanian modern yang dikerjakan di 3.000 perkebunan dan sawah-sawah pertanian yang meliputi 4 juta acres, dengan buruh Afrika sebanyak 130.000. Sebaliknya orang-orang Afrika mengerjakan 7 juta acres dengan jumlah pekerja yang jauh lebih besar.

¹ 1 contos = 1000 escudos
100 escudos = US\$ 3.50.

Di sektor pertambangan, komoditi utama adalah batu bara yang hasilnya mencapai sebanyak 350.000 ton. Sebagian besar dipakai sendiri, sebagian kecil diekspor. Di samping itu terdapat biji besi di sekitar Lorenzo yang akan dikerjakan oleh Jepang dengan modal permulaan sebesar 50 juta. Diketahui pula bahwa terdapat sumber pertambangan lain yang sampai sekarang belum dikerjakan.

Meraca pembayaran Mozambik memperlihatkan gejala negatif yang makin lama makin besar, terutama setelah pasukan-pasukan pembebasan di bawah pimpinan Frelimo menjadi makin kuat, serta meningkatkan operasi-operasinya. Pemerintah Portugal dalam rangka pembangunan Mozambik sedang membuat Bendungan Raksasa di Cabora Bassa, yang dikerjakan dengan modal Afrika Selatan, Jerman dan Perancis. Sedianka direncanakan bahwa bendungan raksasa ini akan selesai dalam tahap pertama pada tahun 1974, akan tetapi dengan adanya gangguan-gangguan dari Frelimo, rencana pembangunan agak terlambat. Cabora Bassa akan menghasilkan 18.000 juta KWH per tahun, jauh lebih besar dari Bendungan Aswan di Mesir yang menghasilkan 10.000 juta KWH setahun. Sebuah danau buatan akan digali sebesar 150 mil, sampai perbatasan dengan Zambia. Proyek raksasa ini akan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dengan sasaran untuk mentransmigrasikan 1 juta orang Portugal di Mozambik. Di samping itu, Bendungan raksasa ini akan dimanfaatkan juga untuk keperluan industri, bukan saja untuk Mozambik, akan tetapi juga untuk keperluan Afrika Selatan dan Rhodesia.

ANGOLA di pantai Darat Afrika Tengah, luasnya sampai 1.246.700 km persegi dengan penduduk sebanyak 5.430.000 orang, di antaranya 170.000 kulit putih dan 53.000 orang mestizo. Berlainan dengan Mozambik, sektor pertambangan di Angola, terutama setelah tahun 1960, memperlihatkan perkembangan pesat dibandingkan dengan pertambangan di bidang pertanian dan perkebunan.

PERTAMBANGAN (metrik ton)

	1967	1968	1969
Besi	1.154.303	3.218.222	5.477.657
Mangan	33.180	9.150	29.070
Minyak	557.152	749.614	2.457.512
Berlian (carats)	1.288.501	1.607.133	2.021.537

Sumber: AFRICA South of the Sahara, 1972, Europe Publication - p. 187.

Dari hasil pertambangan, terutama untuk crude oil terdapat penyifilangan yang juga memperlihatkan angka-angka produksi yang naik:

INDUSTRI MINYAK (metrik ton)		
	1968	1969
Fuel oil	354.442	389.265
Gas oil	135.452	98.389
Motor spirit	63.882	61.696

Sumber: ibid.

Dalam sektor pertanian dan perkebunan, kopi robusta masih merupakan komoditi utama. Kopi diproduksi di daerah-daerah Utara Angola, baik dalam perkebunan-perkebunan yang dikuasai oleh orang-Portugis putih, maupun perkebunan-perkebunan rakyat yang menjual hasilnya di pusat pembelian pemerintah di beberapa tempat. Pada tahun 1968 petani kopi Afrika menjual 70.000 ton kopi seharga 360 juta escudos. Di samping kopi terdapat sisal dan kapas yang keduanya tidak begitu maju, mungkin karena turunnya harga di pasaran dunia.

Sangat menarik perhatian bahwa pada tahun 1961 di Angola dimulai pemberontakan oleh gerakan-gerakan kemerdekaan Afrika terhadap Portugal, dan setelah Angola barulah menyusul di Guinea Bissau dan di Mozambik. Akan tetapi di Guinea Bissau dan di Mozambik gerakan kemerdekaan berhasil mempersatukan diri dengan hasil-hasil gemilang. Sebaliknya di Angola gerakan kemerdekaan terpecah dan mungkin karena kemajuan dalam sektor penghidupan rakyat, baik di pertanian kopi, maupun karena diketemukannya sumber-sumber minyak di daerah-daerah Utara, daerah pemberontakan, maka perjuangan kemerdekaan di Angola menjadi lemah.

Ketiga daerah tadi, Guinea Bissau, Mozambik dan Angola telah dikuasai Portugal selama lima abad. Angin liberalisme yang mempengaruhi negara-negara lain di Eropa Barat pada dekade 1920-an, tidak ada pengaruhnya di Portugal. Pada tahun 1933 disyahkan Undang-undang Penjajahan yang dengan tegas menetapkan bahwa daerah-daerah Portugal di Afrika merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari daerah metropolitan di Eropa. Pada tahun 1951, waktu Portugal ingin menjadi anggota PBB, doktrin tahun 1933 disesuaikan dengan iklim dekolonisasi dengan penjelasan bahwa daerah-daerah Portugal di Afrika merupakan bagian integral Portugal, jadi tidak merupakan

Jajahan yang harus dipersoalkan di Dewan Dekolonisasi PDB. Doktrin tadi, pada tahun 1961 diperlunak lagi dengan pernyataan bahwa daerah-daerah Portugal di Afrika merupakan propinsi-propinsi Sabo-rang Lautan negara Portugal.

Akan tetapi "permainan" legislatif oleh Pemerintah Portugal ini tidak dapat membendung arus dekolonisasi yang mulai mempengaruhi bangsa-bangsa Afrika Selatan Sahara. Sejak tahun 1961 di Angola perjuangan kemerdekaan meningkat menjadi perlawanan bersenjata oleh kesatuan-kesatuan MPLA dan Grae. Pada tahun 1963 di Guinea Bissau perjuangan dipimpin oleh gerakan PAIGC di bawah Amilcar Cabral. Sejak tahun 1964 Mozambik mulai dengan Frelimo di bawah Mondlane. Dapat dikatakan bahwa perlawanan bersenjata gerakan-gerakan kemerdekaan di daerah-daerah Portugal di Afrika berkembang dengan baik. Walaupun pemerintah Portugal dalam pernyataan-pernyataannya selalu mengecilkkan peranan gerakan kemerdekaan tadi, kondisi keamanan dan ketertiban di daerah-daerah tersebut memaksa Portugal untuk menempatkan lebih banyak angkatan perangnya di Afrika. Pada tahun 1969 Portugal hanya menempatkan beberapa ribu serdadu di Afrika. Pada tahun 1970, hampir segenap kekuatan AP Portugal dikirim ke Afrika untuk memelihara kestabilan dan kesatuan negara. Pada tahun 1970 di Portugal sendiri hanya dipelihara beberapa penataran tetap dan satu divisi AD yang diperbantukan pada NATO. Selainnya 150.000 pasukan, di Angola 55.000, di Mozambik 65.000 dan di Guinea Bissau 35.000, diperkuat dengan sebagian besar AL dan AU, ditambah dengan satuan-satuan polisi dan dinas rahasia, ditempatkan di Afrika. Angka-angka dari anggaran belanja Portugal sejak tahun 1964 memperlihatkan peningkatan operasi-operasi Angkatan Perang dan Security dari pemerintah Portugal.

Walaupun pemerintah Portugal dalam menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan di Afrika menempatkan makin banyak pasukan-pasukan dan mengeluarkan lebih banyak keuangan, dan walaupun dalam usaha ini, terutama di daerah Angola dan Mozambik, Portugal bekerjasama dengan Afrika Selatan dan Rhodesia, ternyata bahwa kondisi-kondisi di Afrika itu telah menjadi sebab dari penggulingan pemerintah Portugal oleh opsir-opsir Angkatan Perang. Pemerintah baru yang mengakhiri rezim kediktatoran di Portugal, yang telah berkuasa selama 50 tahun, dalam program dekolonisasi menunjukkan keinginan untuk segera mengakhiri beban penjajahan. Bila proses dekolonisasi tidak dilaksanakan dengan tepat, maka kondisi di Afrika terutama di Angola dan Mozambik akan tetap merupakan faktor yang menentukan untuk Portugal.

III. Gambaran umum tentang Afrika bagian Selatan Sahara

Perkembangan yang terjadi di daerah-daerah koloni Portugal itu tentulah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi di Afrika pada umumnya di Afrika bagian Selatan Sahara pada khususnya.

Wilayah Afrika bagian Selatan Sahara pada pertengahan abad III dikuasai oleh Inggris, Perancis, Belgia dan Portugal. Di samping itu Afrika Selatan dikuasai oleh minoritas kulit putih yang dengan gigih melaksanakan politik apartheid.

Kesatuan-kesatuan administrasi yang disusun oleh penjajah, seperti Afrika Barat Perancis dan Afrika Equatorial Perancis dipecah-pecah menjadi beberapa negara seperti Senegal, Guinea, Ivory Coast, Upper-Volta, Niger, Gabon, Congo-Brazzaville, Chad, Central African Republic. Kesatuan administratif Inggris pada umumnya dilanjutkan sebagai negara merdeka, terkecuali di Afrika Tengah dengan Central African Federation yang pecah menjadi Malawi, Zambia dan Rhodesia. Daerah Belgia, di Congo dilanjutkan sebagai satu negara, sedangkan Rwanda dan Burundi dipecah menjadi dua negara.

Proses balkanisasi ini berakibat bahwa struktur administrasi penjajahan - terutama dari daerah-daerah Perancis - yang sebenarnya sudah kurang akan kader-kader Afrika, dipecah-pecah untuk dapat mengisi keperluan negara-negara yang baru merdeka. Karena itu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi negara merdeka, pada umumnya pemerintah² di wilayah Afrika bagian Selatan Sahara tidak mempunyai alat administrasi yang lemah yang kemudian menjadi retak karena pertentangan-pertentangan antara suku-suku yang ingin menguasai pemerintahan. Karena ternyata, bahwa posisi politis sebagai kepala negara, walaupun terjamin dan terbatas oleh Undang-undang Dasar, dalam kenyataan mencakup political power dan economic power untuk menentukan proyek-proyek yang menguntungkan dan menguntungkan pembagian kekayaan antara warga sukunya. Lebih lagi penghasilan negara pada umumnya habis terpakai oleh korps pegawai negeri yang makin bertambah, untuk membiayai perwakilan-perwakilan negara di PBB, perwakilan di Addis Ababa untuk Organisasi Persatuan Afrika, untuk kedutaan-kedutaan besar di negara-negara bersahabat dan untuk memelihara angkatan perang.

Terkecuali beberapa negara seperti Zambia, Zaire, Nigeria dan Sierra Leone yang memiliki sumber pertambangan seperti tembaga, minyak bumi dan berlian, negara-negara lain semuanya merupakan negara agraris dengan penghasilan dari coklat, kopi, sisal dan

sebagainya, yakni hasil perkebunan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang asing. Dari tabel ekspor dapat dipelajari bahwa hasil perkebunan tadi merupakan bagian terbesar dari jumlah ekspor seluruhnya. Perhitungan mengenai Gross Domestic Product didasarkan atas penghasilan perkebunan dan pertambangan. Produksi dari rakyat banyak yang hidup dalam kondisi subsistensi tidak dicakup dalam perhitungan GDP. Bahkan penghasilan pertambangan seperti di Zambia dan di Zaire untuk sebagian besar ditransfer ke negara asal perusahaan-perusahaan asing. Investasi modal asing, di antaranya dari World Bank dan IMF hanya bermanfaat di Zaire. Perkembangan ekspor memperlihatkan trend meningkat. Uang Zaire adalah satu-satunya mata uang Afrika Selatan Sahara yang diakui oleh IMF.

Perkembangan negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara setelah mencapai kemerdekaan berlainan sekali dengan cita-cita para pemimpin-pemimpin Afrika yang merupakan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di zaman penjajahan. Pada tahun 1945, setelah Perang Dunia II berakhir, di Manchester diadakan pertemuan antara pemimpin-pemimpin Afrika dari jajahan Inggris, di Paris para pemimpin-pemimpin Afrika dari daerah penguasaan Perancis juga berkumpul.

Di Manchester, di antaranya hadir Nkrumah dari Ghana, Azikiwe dari Nigeria dan Jomo Kenyatta dari Kenya. Pertemuan di Manchester berpegang pada wawasan politik demokrasi Inggris, ialah pemerintahan yang dipimpin oleh penghidupan politik berdasar demokrasi parlementer agar dapat menjamin martabatnya perwakilan rakyat, peranan serikat-serikat buruh seperti di Inggris dan sebagainya.

Sebaliknya, di Paris, para pemimpin-pemimpin Afrika di antaranya Senghor dari Senegal dan Houphot Boigny dari Pantai Gading hidup dalam alam Perancis pada waktu itu, ialah cita-cita untuk dapat disamakan dengan warga negara Perancis, pemerintahan dengan berat berat pada eksekutif yang kuat seperti de Gaulle dan terutama memperhatikan hubungan erat dengan negara induk baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan pertahanan.

Dari tabel Coup dan Sistem Pemerintahan dapat dilihat bahwa gejolak-gejolak masyarakat dalam bentuk coup dan perubahan pemerintahan dari sistem multi-partai ke sistem satu partai, tidak terlokalisasi pada negara-negara bekas jajahan Inggris, akan tetapi juga terjadi di negara-negara bekas jajahan Perancis. Bahkan di Zaire (Congo-Kinshasa), bekas jajahan Belgia kemerdekaan disertai dengan pertikaian saudara yang maha dahsyat. Gejala coup dan counter-coup terjadi di negara-negara kecil seperti Dahomey, Togo dan Congo-Brazzaville. Negara-negara besar seperti Nigeria dan Zaire juga mengalami balai

sejarah yang berdarah. Baik pemerintahan konservatif seperti Upper-Volta dan Central African Republic, maupun pemerintahan sosialis seperti Ghana dan Mali, begitu juga pemerintahan demokratis seperti di Nigeria dan Sierra-Leone, semua mengalami nasib yang sama. Bahkan di Chad, Perancis mengirimkan pasukan Legiun Asing atas permintaan pemerintah Chad untuk dapat menumpas pemberontakan yang terjadi di negara itu.

=====

NEGARA-NEGARA SELATAN SAHARA DIBAGI MENURUT SISTIM
Pemerintahan dan Coup-Coup

Negara	coup	satu partai	pemerintahan militer
1. Botswana (Inggris)	-	x	-
2. Burundi (Belgia)	x	x	x
3. Cameroon (Inggris + Perancis)	-	x	-
4. Central African Republik (Perancis)	x	x	x
5. Chad (Perancis)	-	x	x
6. Congo Brazzaville (Perancis)	x	x	x
7. Congo-Zaire (Belgia)	x	x	x
8. Dahomey (Perancis)	x	x	-
9. Gabon (Perancis)	x	-	-
10. Gambia (Inggris)	-	x	-
11. Ghana (Inggris)	x	x	x
12. Guinea (Perancis)	-	x	-
13. Ivory Coast (Perancis)	-	x	-
14. Kenya (Inggris)	-	x	-
15. Lesotho (Inggris)	-	x	-
16. Liberia (Inggris)	-	x	-
17. Malagasy (Perancis)	x	-	x
18. Malawi (Inggris)	-	x	-
19. Mali (Perancis)	x	-	x
20. Mauretania (Perancis)	-	x	-
21. Niger (Perancis)	-	x	-
22. Nigeria (Inggris)	x	-	x
23. Rwanda (Belgia)	x	x	x
24. Senegal (Perancis)	-	x	-
25. Sierra Leone (Inggris)	x	x	-
26. Somalia (Italia/Inggris)	x	x	x
27. Sudan (Inggris)	x	x	x
28. Swaziland (Inggris)	-	x	-
29. Tanzania (Inggris)	-	x	-
30. Togo (Perancis)	x	-	x
31. Uganda (Inggris)	x	-	x
32. Upper Volta (Perancis)	x	-	-
33. Zambia (Inggris)	-	x	-
34. Ethiopia	x	-	x

Sumber: AFRICA South of the Sahara 1972. op. cit. dan Politics of the Developing Nations, Fred. R. van der Meijden, N. 9.

Pergolakan masyarakat-masyarakat di Afrika bagian Selatan Sahara tidak dapat dilepaskan dari kondisi rakyat yang untuk 90% lebih hidup dalam taraf subsistensi sebagai akibat pengembangan ekonomi kolonial yang amat pincang. Dalam periode pra-kemerdekaan, penguasa-penguasa kolonial sebenarnya sudah mulai melaksanakan proyek-proyek pertanian, seperti proyek penanaman kacang tanah di bagian Perancis dan di Tanganyika, untuk keperluan kebutuhan akan minyak kacang. Proyek-proyek ini merupakan proyek raksasa dengan alat-alat mekanisasi besar. Misalnya di Tanganyika untuk proyek ini sudah diinvest sebanyak 80 juta dollar, namun ternyata bahwa perencanaan kurang mencakup faktor-faktor iklim, tenaga kerja, baik karena kurang skilled, maupun karena masih hidup sebagai pengembara (nomads), sehingga uang banyak tadi sudah hilang tanpa bekas. Di daerah Perancis proyek ini disebut groundnut scheme dan ditoritikan kepada Office di Niger, tetapi investasi sebanyak 200 juta dollar sudah hilang, dan proyek dihentikan.

Dalam sektor perkebunan di daerah Anglo-phone yaitu bekas-bekas koloni Inggris, hanya dua daerah dipandang baik untuk settlement orang putih, ialah Kenya dan Rhodesia. Pada tahun 1950, di Kenya terdapat 7.000 ha yang digarap oleh perkebunan-perkebunan putih. Dengan meletusnya pemberontakan Mau-Mau pada tahun 1953 Jomo Kenyatta sebagai pemimpin suku Kikuyu dibuang ke Kepulauan Seychelles, kemudian dengan kemerdekaan pada tahun 1964 dengan Jomo Kenyatta sebagai Presiden pertama, maka kebanyakan orang putih ingin menjual perkebunan-perkebunannya, karena takut kemungkinan gejolak-gejolak orang hitam. Ternyata bahwa Kenyatta sebagai Presiden dapat meyakinkan pemerintah Inggris bahwa peralihan perkebunan dari tangan putih ke tangan hitam tidak akan merugikan kepentingan Inggris. Maka sejak tahun 1970 pemerintah Inggris memberi bantuan kepada Kenya untuk membayar kompensasi pada pengusaha-pengusaha Inggris. Dengan politik ekonomi yang sukses tadi, dengan infra-struktur kekuasaan dalam tangan suku Kikuyu, diperkuat dengan adanya satu batalyon tentara Inggris, yang melakukan "latihan" terus-menerus, maka Kenya di mata orang Barat merupakan sukses.

Di negara-negara Franco-phone, yakni bekas-bekas koloni Perancis pada umumnya ikatan dengan Perancis tetap dipelihara, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan maupun kebudayaan. Kurikulum sekolah-sekolah di negara-negara Franco-phone tetap menggunakan buku-buku Perancis yang dicetak di Perancis. Benar-benar penghasil devisa untuk Perancis yang tidak dapat diabaikan. Di

bidang ekonomi pola lama dipertahankan dengan penghasilan cacao, kacang tanah, kelapa dan sebagainya. Diketemukannya uranium di Niger membawa perubahan investasi dengan masuknya modal Jepang.

Gejala lain adalah usaha beberapa pemimpin Afrika, yang tertarik oleh pelajaran-pelajaran komunis untuk melaksanakan "State Farms", seperti terjadi di Ghana dan Guinea. Baik di Ghana, maupun di Guinea, proyek "State farms" menemui kegagalan, walaupun dulunya kedua pemerintah dengan bangga mengumumkan bahwa jumlah State farms telah bertambah dari 26 pada tahun 1962, menjadi 107 pada tahun 1963, dan pada tahun 1966 menjadi 135 farms dengan 20.000 buruh. Proyek ini, seperti proyek kacang tanah yang dilaksanakan oleh penjajah, menandakan ketidak-sabaran dari penguasa pada periode-periode tadi, dalam menghadapi kondisi subsistensi kebanyakan penduduk. Baik proyek sosialis dari Sekou Toure dan Nkrumah, maupun proyek penjajahan tidak mencakup perhitungan mengenai gap antara subsistence farming dengan mechanized farming. Ada pula pembangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. Suksesnya gerakan koperasi di Eropa Barat, terutama di Inggris dan di Skandinavia ternyata belum dapat berhasil di benua Afrika. Walaupun terdapat sifat komunal, misalnya pemeliharaan ternak dalam bidang produksi dan pembagian hasil produksi secara komunal, namun kenyataan dalam masyarakat Afrika asli masih tetap didasarkan atas hasil produksi secara pribadi, misalnya dalam famili-famili poligan, walaupun tidak terdapat pembagian tanah karena tanah pada umumnya masih kosong, tiap isteri menggarap tanah sendiri untuk keperluan pribadi dan anak-anaknya.

Pola pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dilaksanakan terutama di Tanzania. Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan pengalaman bahwa koperasi dalam masyarakat Afrika yang miskin tidak dapat menghadapi perusahaan-perusahaan dagang yang pada umumnya berada di tangan asing, maka prinsip koperasi di Tanzania dikembangkan menjadi sistim Ujamaa - Gotong Royong - di mana kerjasama di bidang ekonomi diperkuat dengan kegotong-royongan dalam bidang politik, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat pusat. Tekad bangsa Tanzania untuk dapat melanjutkan hidup didasarkan pada kesadaran bahwa negerinya miskin, tidak memiliki kekayaan alam, karena itu satu-satunya jalan adalah untuk bekerja keras dalam batas-batas kemampuan sendiri. Cita-cita sederhana tadi, diajukan oleh Presiden Nyerere pada tahun 1966. Pada tahun 1967 diterima Arusha Declaration, program politik yang menjadi dasar pembangunan selanjutnya. Di Tanzania memang kelihatan bahwa pemerintahnya dengan konsekwen melakukan investasi di daerah-daerah dan tidak di kota-kota.

Sekarangpun sudah kelihatan, bahwa program Tanzania untuk mengutamakan kemajuan rakyat di daerah-daerah mulai membawa sukses. Ini dapat membangkitkan gerakan rakyat-rakyat lain di Afrika, di mana pembangunan masih tetap diutamakan untuk elite kecil dan pengusaha-pengusaha asing.

IV. Cita-cita kerjasama regional

Pemerintah-pemerintah semua negara Afrika Selatan Sahara harus menyelesaikan masalah penghidupan penduduk yang miskin dengan resources yang belum dapat dimanfaatkan untuk rakyat banyak. Sainpan yang pernah ada antara daerah Franco-phone dan daerah Anglo-phone, dan selanjutnya adanya daerah-daerah yang dikuasai Belgia dan Portugal, pada umumnya masih tetap berlaku. Bahkan Guinea waktu ke luar dari pengaruh Perancis, segera menerima investment Amerika Serikat. Monopoli Belgia di Zaire sudah diganti oleh modal Amerika dan Jerman Barat. Walaupun diharapkan bahwa dengan kemerdekaan akan timbul zaman kerjasama antara negara-negara Afrika merdeka, namun kerjasama regional belum dapat memenuhi harapan.

Pada tahun 1961 di Casablanca diadakan konferensi antara kepala-kepala negara dari Maroko, Guinea, Mali, Aljazair dan Libya. Pada tahun 1961 diadakan juga konferensi di Monrovia, dihadiri oleh 19 negara. Antara group Casablanca dan group Monrovia tidak terdapat kerjasama, bahkan digambarkan seolah-olah ada pemisahan antara negara-negara "revolutioner" dan group yang "non-revolutioner".

Pada bulan September 1961 di Tananarive ditandatangani Charter Union Africaine et Malgache, yang kemudian pada tahun 1965 menjadi Organization Commune Africaine et Malgache (OCAM). Dari ketiga kerjasama regional tadi hanya OCAM masih ada, bahkan dengan Yaounde Convention pada tahun 1963, semua negara OCAM menjadi associate members dari PDE. Lain daripada itu, antara negara-negara Franco-phone masih terdapat kerjasama dalam bidang Bea Cukai antara negara-negara di Afrika Barat dan satu organisasi untuk negara-negara Afrika Central. Untuk keperluan penjualan gula organisasi OCAM diperkuat lagi dengan Mauritius, sehingga OCAM menjadi OCAMB.

Untuk daerah Anglo-phone, sebelum kemerdekaan Inggris telah melotakkan dasar kerjasama regional di Central African Federation yang pada tahun 1964 pecah menjadi Rhodesia, Malawi dan Zambia. Sekarang Rhodesia mendekati Afrika Selatan, karena sama-sama putih,

Malawi memelihara hubungan ekonomi dengan Afrika Selatan, karena banyak buruh Malawi menjadi buruh di industri Afrika Selatan. Dan Zambia sedang meletakkan dasar kerjasama dengan Tanzania, misalnya dalam pembuatan Tanzam railway yang akan memungkinkan ekspor Zambia melalui pelabuhan-pelabuhan di Tanzania. Railway ini dibuat dengan kredit RRC, setelah usaha Tanzania dan Zambia untuk mendapat kredit dari Inggris dan dari Worldbank gagal. Sejarah pembuatan Bendungan Aswan di Mesir yang dibuat oleh Soviet, setelah Worldbank mengundurkan diri, terulang kembali dalam pembuatan Tanzam railway.

Di Afrika Timur, Inggris telah meletakkan dasar untuk East African Community yang merupakan gabungan antara satu negara kaya, Kenya, dengan dua negara yang miskin, Uganda dan Tanzania. Dilihat dalam struktur organisasinya, EAC sangat mengagumkan. Ada East African Harbour organization, East African Railway, East African Airways, East African Post and Telecommunication Corporation dan sebagainya, semuanya dibina oleh East African Authority, yang terdiri dari Kepala-kepala Negara ketiga anggota menggambarkan kerjasama regional yang sangat baik. Waktu timbul perselisihan pandangan karena Presiden Uganda digulingkan oleh Jendral Idi Amin, Secretariat East African Community tetap berjalan, untuk dapat memelihara kontinuitas pekerjaan Authority. Tetapi dengan adanya krisis ekonomi di seluruh dunia, maka pihak Kenya mulai meronggalkan ikatan-ikatan, misalnya dengan melepaskan diri dari East African Customs Corporation. Disebabkan oleh pertentangan-pertentangan politik selanjutnya, ditambah lagi dengan chaos di Uganda dan pembangunan di Tanzania yang dititikberatkan pada desa-desa, perkembangan EAC tidak lagi semantap seperti semula.

Pada tahun 1963 didirikan Organization of African Unity - OAU. Dihadiri oleh 41 negara, terdiri dari semua negara-negara Arab, semua negara-negara Afrika Selatan dan Rhodesia. Topics yang dibicarakan adalah:

- Pembentukan Organisasi Negara-negara Afrika.
- Kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmiah, pertahanan bersama.
- Dekolonisasi.
- Apartheid dan diskriminasi rasial.
- Aspek-aspek untuk pembentukan kelompok-kelompok ekonomi regional.
- Afrika dan PBB

Dari pembicaraan antara Kepala-kepala Negara yang berkumpul di bawah naungan OAU timbul rumusan mengenai tujuan dan usaha sebagai berikut:

- "- To promote unity and solidarity among African States.
- To coordinate and intensify their efforts to improve living standards in Africa.
- To defend their sovereignty, territorial integrity, and independence.
- To eradicate all forms of colonialism from Africa.
- To promote international cooperation, having due regard to the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human rights."

Solidaritas negara-negara Afrika terutama menonjol di bidang politik, di forum internasional seperti di PBB, dalam konferensi-konferensi Non-aligned dan sebagainya. Afrika pada umumnya beraksi dengan satu suara. Solidaritas didasarkan atas perjuangan Afrika melawan sisa-sisa kolonialisme di Afrika, terutama dalam bentuk apartheid dan diskriminasi rasial yang berlaku di Afrika Selatan, Rhodesia dan daerah-daerah Portugal. Walaupun solidaritas dalam hal voting telah berhasil membuat PBB menclorkan resolusi untuk menentang politik apartheid, bahkan berhasil mengadakan embargo terhadap Afrika Selatan, Rhodesia dan daerah-daerah Portugal, kenyataan ini masih menunjukkan bahwa beberapa anggota PBB, terutama Perancis, dengan penjualan kapal-kapal selam dan persenjataan lain, selangitnya Jepang yang mempunyai neraca perdagangan dengan Afrika Selatan sebesar 1 milyar dollar, tidak menghiraukan resolusi-resolusi PBB. Begitu pula Resolusi PBB yang menentukan South West Africa sebagai mandat PBB harus ditempatkan di bawah pengawasan PBB tidak dihiraukan oleh Afrika Selatan, bahkan sudah mulai diinkorporasikan dalam Afrika Selatan.

Perlu disadari juga bahwa kohesi politik dari negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara di PBB pernah mengeluarkan suara abstain dalam perdebatan mengenai soal Irian Barat. Motivasi ini Afrika didasarkan atas kenyataan di Afrika, di mana dalam pertemuan perlu dikeluarkan one man one vote, agar terdapat precedent untuk voting di daerah-daerah Afrika yang masih dijajah, yang memungkinkan mayoritas dapat mencapai kemenangan mutlak. Juga dalam forum Non-aligned blok Afrika diperkuat dengan negara-negara Karibia, dan makin lama dapat merupakan mayoritas terhadap persoalan-persoalan di mana Indonesia mempunyai pendirian yang

berlainan dengan blok Afrika. Pengalaman di Georgetown, Kabul dan Aljazair cukup meyakinkan bahwa kohesi negara-negara Afrika dalam forum politik Internasional merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan.

7. Pengaruhnya terhadap Mozambik, Angola dan Guinea Bissau

Dalam pelaksanaan untuk menghancurkan penjajahan di bumi Afrika, dibentuklah sebuah Liberation Committee yang berkedudukan di Daressalaam - Tanzania. Komite ini sebenarnya merupakan semacam Joint Headquarters for Liberation, namun kenyataan menunjukkan bahwa Liberation Committee ini tidak efektif, karena terpecah antara pejabat-pejabat yang memang ditunjuk oleh beberapa negara; akan tetapi selalu bertengkar mengenai kepentingan-kepentingan pribadi. Sebaliknya, berlainan dengan negara-negara Afrika merdeka di mana pada umumnya terdapat sistem satu partai, maka di daerah-daerah yang masih dijajah selalu terdapat dua gerakan kemerdekaan; misalnya untuk Rhodesia terdapat Zimbabwe African National Union dan Zimbabwe African People's Union - ZANU dan ZAPU. Di Angola terdapat MPLA dan GRAE; di Afrika Selatan Pan African Congress dan African National Congress. Tidak mengherankan bahwa pihak-pihak ketiga selalu berusaha untuk "menarik" salah satu dari Freedom movements di bawah naungannya. Untuk daerah-daerah itu maka freedom movements lebih berarti sebagai lobby di Daressalaam, Lusaka, Cairo dan Aljazair daripada gerakan yang benar-benar merupakan kesatuan-kesatuan bertempur di daerah masing-masing. Kondisi di Guinea Bissau dan di Mozambik berlainan sekali. Di Guinea Bissau gerakan kemerdekaan dibina oleh PAIGC - Partido Africano da Independencia da Guinea e Cabo Verde, di bawah pimpinan seorang pemimpin Amilcar Cabral, seorang lulusan Universitas di Lisbon. Gerakan ini disokong penuh oleh Guinea di bawah Sekou Toure. Walaupun Amilcar Cabral dibunuh pada tahun 1972, namun PAIGC berhasil melanjutkan perang gerilya dengan membebaskan sebagian besar dari Guinea Bissau. Hal ini disaksikan oleh sebuah komisi PBB yang dalam laporannya meyakinkan bahwa Guinea Bissau telah menguasai daerah, mempunyai pemerintahan dan merupakan negara merdeka. Blok Afrika, blok Sosialis dan beberapa negara non-aligned termasuk Indonesia pada bulan September 1974 mengakui Guinea Bissau sebagai negara merdeka.

Begitupun di Mozambik. Bantuan sepenuhnya yang diberikan oleh Tanzania dan Zambia, kenyataan adanya pasukan-pasukan gerilya di dalam wilayah Mozambik, adanya daerah bebas, seperti disaksikan

oleh beberapa wartawan Inggris, Amerika dan Perancis menunjukkan kebenaran dalih bahwa gerilya dapat berhasil, bila ada negara tetangga yang baik, ada organisasi yang kokoh dan ada pimpinan yang gigih.

Kertumbuhan doktrin perjuangan baik di Guinea Bissau, maupun di Mozambik untuk sementara waktu sangat terpengaruh oleh faktor-faktor anti-penjajahan dan faktor-faktor pembangunan daerah-daerah bebas yang dititikberatkan pada pembangunan desa-desa dalam sistem pertahanan rakyat yang tadinya tidak diperhatikan oleh pemerintah kolonial.

VI. Benteng Putih di Afrika bagian Selatan

Sebelum Portugal melaksanakan dekolonisasi di Afrika, maka daerah-daerah Angola dan Mozambik merupakan bagian dari Benteng Putih di Afrika bagian Selatan, yang terdiri dari Afrika Selatan, Rhodesia, Angola dan Mozambik. Walaupun penduduk kulit putih di Angola dan Mozambik merasa terikat oleh pusat induk di Eropa, tawaran kemerdekaan yang mengembus di Afrika bagian Selatan Sahara yang menghasilkan negara-negara merdeka di bawah pemerintahan yang berkulit hitam, dirasakan sebagai bahaya oleh orang kulit putih yang berkuasa di Afrika Selatan, di Rhodesia, di Angola dan di Mozambik. Kondisi mental yang dimiliki oleh golongan kulit putih, yang merupakan minoritas itu, bersumber di Afrika Selatan yang melaksanakan secara tegas politik "apartheid" untuk menjamin kedudukan minoritas putih terhadap mayoritas hitam.

Pada pertengahan abad XVII, armada-armada Belanda dalam pelayaran dari Nederland ke dan dari Indonesia mendirikan sebuah pelabuhan di Tanjung Harapan untuk dapat beristirahat, untuk menambah air dan perbekalan-perbekalan yang diperlukan untuk awak-awak kapal. Pelabuhan kecil ini, lalu meluas menjadi daerah transmigrasi orang-orang Belanda yang karena iklim baik dapat melaksanakan pertanian. Pendetang-pendetang Belanda ini beragama Calvin atau Luther yang dalam penghidupan sehari-hari selalu berpegang pada Euku Injil, yang mengatakan bahwa orang-orang hitam di Afrika adalah keturunan Ham, anak terkutuk dari Nabi Nuh. Karena itu, bagi orang-orang Belanda tadi orang-orang hitam pantas dijadikan budak. Pada tahun 1717 VOC (Verenigde Oost-Indie Compagnie) yang menguasai pelayaran dan pelabuhan-pelabuhan dalam perjalanan antara Nederland dan Indonesia, menentukan bahwa daerah di Afrika Selatan untuk selanjutnya dikembangkan dengan sistem perbudakan. Sejak saat itu

Bagi penduduk Afrika Selatan terdapat garis pemisah yang tegas, antara agama Kristen, kekayaan dan kekuasaan pada satu pihak, sedang pada garis sebaliknya terdapat warna hitam yang berarti kebodohan, kemiskinan dan perbudakan. Kondisi mental ini dapat bertahan dan berkembang karena masyarakat putih di Afrika Selatan hidup tersendiri, terpisah dari perkembangan pemikiran di Eropa. Ketika pada akhir abad XVIII dan pada abad XIX Inggris mulai datang di Afrika Selatan, maka golongan Belanda yang kolot pikiran pindah ke pedalaman di Transvaal dan Oranye Vrij-Staat yang menjadi negara-negara yang menentang Inggris. Dengan diketemukannya emas di daerah Transvaal dan Oranye Vrij-Staat, isolasi orang-orang Boer tidak dapat dipertahankan lagi. Setelah melakukan perang pada permulaan abad XX, Inggris menduduki seluruh Afrika Selatan. Namun demikian kondisi mental orang-orang Boer dapat bertahan, bahkan dapat berkembang, sehingga pada tahun-tahun 1950-an, partai Nasionalis, yang merupakan partai orang Boer, dapat menang dalam pemilihan umum. Sejak itu, cita-cita apartheid yang ditamanibitnya pada tahun 1717, menjadi realitas di dalam policy pemerintah Afrika Selatan dituangkan dalam undang-undang dan pengawasan polisi yang ketat.

Penduduk Afrika Selatan menurut sensus tahun 1970, terdiri dari 15.900.000 jiwa, dibagi dalam 3.000.000 kulit putih, 10.900.000 Bantu (orang hitam), 1.500.000 Coloureds dan 800.000 orang Asia (India dan Pakistan).

Pemerintah Afrika Selatan yang terdiri dari minoritas putih, yang hanya merupakan 17,8% dari jumlah seluruhnya, telah mengadakan pemisahan tegas antara putih dan non-putih. Kedua golongan tadi, menurut teori rasialisme, akan menempuh "separate development" - pembangunan sendiri-sendiri. Dalam pelaksanaan ternyata bahwa mayoritas Afrika yang merupakan 60% dari penduduk ditransmigrasikan ke dalam daerah yang luasnya hanya 14% dari segenap areal tanah Republik Afrika Selatan. Bahkan tanah yang ditentukan tadi, merupakan tanah yang pada umumnya gersang. Daerah-daerah yang khusus ditentukan untuk penduduk-penduduk Afrika dinamakan "bantustans". Dalam daerah-daerah tertutup tadi, orang-orang Afrika dapat hidup "bebas" dan dapat mengadakan "pemerintahan dan pembangunan" sesuai dengan cita-citanya. Sebaliknya ekonomi Afrika Selatan, yang seluruhnya dikuasai oleh minoritas putih berkembang dengan pesat. Pada ekonomi pertanian pada abad XVII, sampai dengan penemuan berlian dan emas pada pertengahan abad XIX menyebabkan kedatangan Inggris yang berakibat bahwa pada abad XX Afrika Selatan menjadi bagian

Kerajaan Inggris. Sampai sekarang produksi emas Afrika Selatan mencapai 80% dari produksi emas dunia - tidak diperhitungkan produksi emas di blok Soviet. Di samping emas dan berlian, Afrika Selatan ternyata memiliki sumber-sumber bijih-besi, batu bara, platinum, asbestos dan uranium dalam jumlah besar. Di samping itu terdapat tembaga, seng dan timah hitam. Yang belum diketemukan, walaupun pemerintah Afrika Selatan telah mengeluarkan jutaan untuk eksplorasi, adalah minyak bumi dan bauksit.

Untuk mengolah sumber-sumber pertambangan telah didirikan industri-industri ringan, sedang dan berat. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di benua Afrika yang dapat memproduksi dan meng-ekspor barang-barang hasil industri. Gross Domestic Product antara 1960 dan 1970 meningkat sampai dua kali, menunjukkan growth yang mencapai 9% per tahun. Gross Domestic Product pada tahun 1969 mencapai R. 11.635 juta atau R. 503 per capita. Angka-angka ini jauh melampaui angka-angka dari negara-negara Afrika lainnya. Namun distribusi pendapatan tidak seimbang, bila diadakan perbandingan antara penghasilan golongan putih dan golongan hitam, misalnya dalam bidang pertambangan gaji seorang buruh putih adalah 16 kali seorang buruh hitam, dalam industri ratio mencapai 6 kali lebih besar. Perkembangan industri dan pertambangan di Afrika Selatan membawa kenaikan dalam kebutuhan akan buruh. Buruh kasar didatangkan dari Mozambik, Malawi dan dari Angola. Kebutuhan akan skilled labour menimbulkan kesulitan lebih besar, karena pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh pemerintah Afrika Selatan dalam pendidikan kejuruan dan Universitas-universitas, untuk golongan hitam.

Politik Apartheid dari pemerintah Afrika Selatan yang dikuasai oleh keturunan Boer mendapat tantangan dari mayoritas Afrika dan dari golongan-golongan kulit berwarna lain. Dalam hal ini terutama menonjol organisasi-organisasi seperti African National Congress, South African Indian Congress dan The Coloured Peoples Political Organization. Bahkan ada golongan kulit putih yang tergabung dalam White Congress of Democrats yang bersama-sama dengan organisasi orang-orang berwarna tadi pada tahun 1955 menyusun Freedom Charter yang merumuskan dasar-dasar untuk suatu masyarakat demokratis dan non-rasial. Pada tahun 1956 pemerintah menangkap lebih dari 150 tokoh-tokoh yang menandatangani Freedom Charter tadi. Di muka pengadilan mereka dituduh "makar untuk menggulingkan pemerintah yang syah". Pengadilan perkara ini berlangsung sampai tahun 1961 dengan hasil bahwa semua tertuduh dibebaskan. Akan tetapi, sementara itu, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang sangat membatasi

Kehidupan gerakan-gerakan anti-apartheid. Tindakan-tindakan represif di antaranya mengharuskan tiap orang Afrika di atas umur 16 tahun membawa semacam kartu penduduk yang memudahkan kontrol polisi terhadap orang-orang Afrika. Pada tahun 1960 meletus pemberontakan di daerah Pono Timur menentang pengangkatan kepala-kepala suku oleh pemerintah. Pada tahun 1960 polisi menembak secara membabi buta terhadap massa di Sharpeville, yang mengadakan protes terhadap kewajiban untuk membawa kartu penduduk. Peristiwa Sharpeville ditambah dengan larangan terhadap aktivitas politik oleh golongan Afrika meningkatkan public opinion dunia terhadap apartheid Afrika Selatan. Karena reaksi dunia, maka pada tahun 1961 Afrika Selatan tidak menjadi anggota Commonwealth Inggris. Pada tahun 1963 negara-negara Afrika berhasil di PBB mengeluarkan resolusi pengkutukan terhadap politik Afrika Selatan dan menganjurkan semua negara-negara anggota PBB untuk memboikot Afrika Selatan selama politik apartheid masih dilaksanakan.

Perkembangan Afrika Selatan sejak 1910, yaitu tahun berdirinya Union of South Africa dengan struktur ekonomi bertitik berat pada agraria, sampai pada tahun 1970-an dengan struktur ekonomi yang lebih didasarkan pada pertambangan dan industri, menempatkan Republik Afrika Selatan sebagai intermediate industrial power yang merupakan realitas bukan saja dalam kedudukannya antara negara-negara industri lainnya akan tetapi juga dalam kedudukan sebagai satu-satunya negara di benua Afrika yang mempunyai kemampuan industri dan pertambangan. Dalam hal ini bagi Afrika Selatan akan timbul persoalan pasaran untuk barang-barang industri dan manpower untuk pertambangan dan industri yang sedang meluas. Dalam keadaan yang dengan cepat membawa perubahan-perubahan ke arah kemerdekaan Afrika, maka bagi Afrika Selatan sebagai suatu kekuatan di benua Afrika tidak ada jalan lain daripada mencari perumusan untuk menyesuaikan diri dengan Afrika Hitam yang merdeka.

Isolasi terhadap Afrika Selatan yang mula-mulanya dijadikan putusan PBB, kemudian dalam sidang-sidang berturut-turut dari OAU di Addis Abeba merupakan perhatian utama dari semua negara-negara Afrika, kemudian di Konferensi Non-Aligned di Lusaka diambil keputusan agar Afrika Selatan diboikot, lambat laun membawa perubahan politik dalam tubuh pemerintah Afrika Selatan, hal mana disebabkan oleh tekanan luar negeri, peningkatan aktivitas gerilya di Rhodesia, Angola dan Mozambik dan secara intern karena kekalahan sayap kolot dan kemenangan sayap "verlighte" dalam Nationalist Party pada pemilihan umum tahun 1970. Walaupun partai oposisi United Party juga mencapai tambahan kursi dalam parlemen, namun

politik pemerintah Afrika Selatan masih tetap mempertahankan politik apartheid terhadap mayoritas hitam dengan segala peraturan-peraturan yang ketat, sementara politik baru yang dirumuskan adalah bahwa politik - outward policy - terhadap negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara hendaknya merupakan jaminan untuk kepentingan ekonomi Afrika Selatan dengan mengajak negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara mengadakan dialog untuk menyelesaikan pertikaian. "Dialog" hanya diterima oleh Malawi, Mauritius, Cote d'Ivoire dan Madagaskar. Presiden Malawi Banda mengunjungi Afrika Selatan sebagai Presiden Hitam yang pertama dan disambut sebagai tamu kehormatan, sebagai seorang Putih Kehormatan. Namun dialog tidak dapat dilanjutkan, karena di Madagaskar pemerintah yang pro dialog di bawah Tsirarana digulingkan oleh pemerintah militer yang lebih mengarah ke politik Afrika Hitam. Malawi merubah tekad untuk dialog sejak gerilya yang menuju Rhodesia dan Mozambik melalui daerah Malawi. Ancaman gerilya untuk menghancurkan jalan kereta api di Malawi rupanya sangat berguna, karena gerilya Frelimo telah menghancurkan kereta api di Mozambik di beberapa tempat.

Dengan proses dekolonisasi Portugal, Mozambik telah mempunyai pemerintah transisi dengan Frelimo sebagai unsur pokok, di Angola dekolonisasi hanya merupakan soal waktu saja. Rhodesia, tergantung pada Mozambik untuk menyalurkan barang-barang ekspor dan impornya. Jalan menuju Afrika Selatan harus melalui Botswana, yang sekarang juga mulai memperlihatkan jiwa Afrika-nya. Sir Seretse Khama, Presiden Botswana menyatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk mengambil alih jalan kereta api, yang tadinya merupakan perusahaan Afrika Selatan.

Komposisi penduduk di Rhodesia memperlihatkan bahwa perbandingan antara penduduk hitam dan putih adalah 20 : 1. Minoritas putih sejak 1965 menyatakan kemerdekaan sefihak - Unilateral Declaration of Independence - terhadap pemerintah Inggris. Perselisihan terjadi karena posisi Inggris yang minta jaminan agar penduduk hitam dapat cukup wakil-wakil dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pada lain pihak posisi minoritas putih dalam organisasi Front Rhodesia yang menyatakan bahwa Inggris harus menyerahkan kemerdekaan dulu, baru akan di"atur" mengenai kedudukan penduduk hitam dan dewan-dewan perwakilan rakyat. Perselisihan tidak mencapai penyelesaian. Inggris tidak mau mempergunakan kekerasan untuk menumpas pemberontakan minoritas putih, gerakan gerilya sejak 1967 makin meningkat, akan ditangani dengan operasi bersama dari tentara Rhodesia dan Afrika Selatan gerilya dapat dihalau. Pada tahun 1971, pemerintah Rhodesia dan Inggris mencapai persetujuan yang mencakup bahwa jumlah orang-orang

Afrika dalam dewan-dewan akan bertambah dengan bertambahnya pendapatan per capita. Inggris akan turut serta dengan Rhodesia dalam proyek untuk pembangunan dan pendidikan sejumlah 100 juta pound sterling. Inggris dan Rhodesia setuju bahwa settlement ini akan diselidiki oleh sebuah Commission di bawah Lord Pearce. Di luar dugaan pemerintah Rhodesia dan Inggris, penduduk Afrika di Rhodesia menolak "settlement" yang digariskan oleh Inggris dan pemerintah Rhodesia.

Walaupun pada tahun 1968 PBB menentukan resolusi agar Rhodesia dikenakan embargo, namun ekonomi Rhodesia berkembang terus. Dasar-dasar ekonomi yang tadinya berdasar perkembangan tembakau dan pertambangan batu bara, sejak blokade Inggris lebih diletakkan pada perkembangan industri yang ditujukan terhadap kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan minyak bumi yang sedianya dicukupi melalui Beira di Mozambik, walaupun impor dari Beira dihentikan, masih tetap dapat dipenuhi.

Denteng Putih di Afrika bagian Selatan, yang tadinya mau dibangun terhadap kemerdekaan orang-orang hitam dengan batas Utara di Sungai Zambesi, dengan Republik Afrika Selatan sebagai inti dan Rhodesia, Angola dan Mozambik sebagai periferi, sekarang mulai runtuk. Cita-cita pada tahun 1950 dan seterusnya untuk mendirikan sebuah Common Market antara empat negara tidak pernah menjadi realitas. Operasi bersama untuk menghancurkan gerilya di Angola, Mozambik dan Rhodesia dengan tujuan search and destroy tidak dilaksanakan lagi. Bahkan, waktu di Laurence Marques beberapa ratus orang putih mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah hitam di Mozambik, Afrika Selatan tidak memberi bantuan.

Rhodesia telah menjalankan tindakan-tindakan preventif dengan mengisolir suku-suku dekat perbatasan dengan Zambia dalam resettlement camps. Sebaliknya, baik dari perdana menteri Afrika Selatan, Vorster, maupun oleh Presiden Zambia diadakan anjuran, agar Rhodesia menyesuaikan diri dengan iklim kemerdekaan Afrika, agar Zimbabwe - nama Afrika untuk Rhodesia diberi kemerdekaan dengan pemerintah hitam.

Pemerintah Afrika Selatan masih tetap pada pendirian bahwa perkembangan dalam negeri dengan rasialisme untuk mencapai separate development adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kelanjutan Republik Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan berkeyakinan bahwa negara-negara Afrika Hitam akhirnya akan menerima realitas Afrika Selatan, terutama sebagai raksasa ekonomi yang memerlukan produksi industri Afrika Selatan.

Reaksi negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara terhadap Afrika Selatan tetap menolak politik rasialisme dan apartheid. Negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara menolak pembentukan masyarakat multi-rasial, seperti pernah diusahakan Inggris di Kenya, Uganda dan Tanzania. Multi-rasialisme membawa apartheid. Pengkutukan-pengkutukan di forum seperti di PBB, di OAU dan di Non-Aligned, disertai dengan adanya proses dekolonisasi Portugal telah membawa persoalan agar Afrika Selatan dikeluarkan dari PBB. Akhirnya, walaupun di Sidang Umum PBB usul tadi pasti akan diterima, namun di Dewan Keamanan, walaupun 7 negara setuju, 3 negara menyatakan tidak setuju. Tiga negara kobetulan adalah negara yang mempunyai hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Dapat digambarkan betapa besar kekecewaan dari orang-orang Afrika.

VII. Catatan akhir: Benua Afrika masih akan bergolak terus

Dari ulasan di atas dapat dilihat bahwa dekolonisasi Portugal di Afrika merupakan babak lanjutan dalam scenario konfrontasi antara kulit hitam terhadap kulit putih, antara politik rasialisme, apartheid dan penjajahan terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika Hitam yang ingin merdeka, yang memperjuangkan kehidupan layak berdasarkan peri kemanusiaan dalam batas-batas masing-masing negara. Scenario ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor global dan benua dan sebaliknya perkembangan scenario ini akan dapat mempengaruhi tata tertib dunia.

1. Negara-negara Arab

Perjuangan bangsa-bangsa Arab, terutama di Aljazair dan di Mesir, dulu merupakan pendorong bagi pemimpin-pemimpin Afrika lainnya. Dalam konfrontasi antara Afrika Hitam terhadap Afrika Putih, negara-negara Arab selalu memberi dukungan politis kepada negara-negara hitam. Sebaliknya, secara politis negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara pada umumnya memberikan sokongan kepada perjuangan Arab melawan Israel. Kerjasama politis dipelihara di PBB, dalam forum OAU dan di forum Non-Aligned. Kerjasama militer terjadi di Nigeria. Waktu Biafra ingin memisahkan diri dari Nigeria, Mesir memberikan bantuan militer kepada pemerintah pusat. Dalam Liberation Committee di Daressalaam wakil-wakil Mesir memegang peranan

penting. Peranan Libya dengan menjanjikan bantuan uang kepada beberapa negara Afrika bagian Selatan Sahara telah mengakibatkan beberapa negara Afrika bagian Selatan Sahara memutuskan hubungan dengan Israel, di antaranya di Uganda.

Bantuan negara-negara Arab di bidang ekonomi hampir tidak ada, terkhususnya untuk pengembangan kebudayaan dan pendidikan seperti di Sudan.

Kalaupun hal perkembangan di daerah-daerah Portugal di Afrika, faktor Arab akan terasa di daerah Mozambik. Di dalam Liberation Committee akan mengintensifkan perjuangan gerilya di Rhodesia, atau dengan merakai nama Afrika, di Zimbabwe. Di bidang ekonomi, terutama mengenai kebutuhan minyak bumi, Mozambik mempunyai sumber batu bara dan bendungan listrik di Cabora Bassa. Di bidang politik faktor Arab akan berguna, baik dalam melanjutkan perjuangan untuk menentang apartheid Afrika Selatan dan Rhodesia, maupun sebaliknya dalam dukungan Afrika terhadap Arab dalam konfrontasi melawan Israel. Tetapi, kenaikan harga minyak, yang menguntungkan Arab dan merugikan Afrika Hitam merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan sebagai faktor peranan Arab di Afrika.

3. Investment modal asing

Kalau di zaman penjajahan Afrika dibagi habis antara negara-negara Eropa, yang masing-masing mengkhususkan "miliknya" untuk pengusaha-pengusaha bangsa penjajah masing-masing, maka semula kondisi tadi oleh pengusaha-pengusaha Eropa ingin dilanjutkan. Perancis sempat melanjutkan kondisi tadi di sebagian besar bekas jajahan, yang mula-mula menjadi anggota community Perancis, kemudian dalam beberapa organisasi regional, ditambah dengan perjanjian-perjanjian bilateral dengan memelihara ikatan ketat, baik di bidang politik, bankam dan di bidang ekonomi. Guinea di bawah Sekou Toure mencajak menjadi anggota Community Perancis. Dengan ditemukannya bauksit dan bijih besi, modal Amerika Serikat dan Jerman Barat menggantikan modal Perancis. Guinea Bissau sebagai tetangga Guinea diperkirakan juga mempunyai mineral-mineral yang sampai sekarang belum dikerjakan. Apakah modal Amerika dan Jepang akan masuk?

Di Zaire, yang kaya dengan mineral, di waktu penjajahan, modal raksasa ditanam oleh Union Miniere, sebuah perusahaan Belgia. Dengan kemerdekaan timbulah kekacauan dan perang saudara. Perdana Menteri pertama, Patrice Lumumba seorang muda yang berhaluan Marxist, mungkin dengan cita-cita untuk menasionalisir semua per-

tambangan, menghadapi negara bagian Katanga di bawah Moïse Tshombe yang mempergunakan pasukan-pasukan bayaran kulit putih. Tshombe menentang nasionalisasi pertambangan, akan tetapi ingin mengadakan diversifikasi dalam investment modal agar monopoli Belgia dapat dipecahkan dan diberi kesempatan untuk modal dari Eropa Barat. Tshombe tidak begitu tertarik untuk mengundang modal Amerika Serikat, karena takut bahwa raksasa Amerika akan mendesak modal-modal Eropa lain. Dengan digantikan Tshombe oleh Mobutu, maka Mobutu telah membuka Zaire untuk investment Amerika Serikat dan Jerman Barat. Jepang juga sudah mengadakan eksplorasi untuk investment.

Waktu pecah perang saudara di Nigeria, bekas jajahan Inggris, maka pemerintah pusat mendapat bantuan dari Inggris, Mesir dan Uni Soviet. Sebaliknya Biafra mendapat sokongan dari Perancis. Jangan dilupakan bahwa daerah Biafra, wilayah suku Ibo, adalah daerah minyak.

Persaingan sengit antara Perancis dan Inggris di benua Afrika, baik dalam masa penjajahan maupun dalam alam Afrika Merdeka, ternyata berliku terus. Misalnya di Afrika Barat, dua negara kecil, Ghana dan Pantai Gading dengan sumber alam terbatas, dua-duanya membuat bendungan hydro-electric dengan kapasitas yang jauh melebihi keperluan domestik. Dua-duanya negara tetangga juga memproduksi ban mobil yang juga belum tentu akan mendapat pasaran.

Riwayat negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara yang mempunyai mineral atau bahan pertambangan strategis seperti minyak bumi, memperlihatkan gejala-gejala masyarakat, baik dalam bentuk perang saudara seperti di Zaire dan di Nigeria, ataupun ketegangan-ketegangan seperti di Guinea, Sierra Leone dan di Zambia. Semuanya mempunyai pola yang sama, yaitu bahwa gejala-gejala terjadi bila pola ekonomi bertendensi akan pindah tangan dari modal asing yang sedang berkuasa kepada modal asing baru yang ingin berkuasa juga.

Investment dalam pertanian dan perkebunan, ternyata tidak membawa kegoncangan-kegoncangan masyarakat, seperti halnya dengan investment dari Netherland, Skandinavia, Italia dan lain-lain, yang dilakukan di Ethiopia, Afrika Timur, Afrika Barat dan juga di Afrika Selatan.

3. Investasi Komunis

Di zaman penjajahan para pemimpin Afrika lebih terpengaruh oleh partai2 sosialis di Inggris dan di Perancis daripada partai

ajaran dari Moskow. Bahkan cara hidup kebanyakan pemimpin-pemimpin Afrika tetap meniru way of life Inggris dan Perancis, seperti juga halnya di daerah Belgia dan Portugal.

Sangat menari perhatian bahwa di negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara tidak terdapat Partai Komunis lokal, terkecuali di Sudan yang memang merupakan negara Afro-Arab. Di antara pemimpin-pemimpin Afrika yang terpengaruh oleh Marxisme adalah Patrice Lumumba dari Zaire, Sekou Toure dari Guinea dan Nkrumah dari Ghana. Sejarah menunjukkan bahwa realitas masyarakat Afrika dengan penduduk yang hidup dalam subsistensi tidak sesuai untuk mempraktekkan Marxisme dalam bentuk apapun juga. Walaupun di beberapa negara ada serikat-serikat buruh seperti di Guinea, Zaire, Zambia dan Tanzania, namun peranan serikat buruh tidak berarti dalam mengorganisir penduduk-penduduk yang tidak mengenal produksi, terkecuali produksi subsistensi dalam menggarap tanah gersang untuk keperluan sendiri. Struktur masyarakat Afrika merdeka tidak banyak berbeda dengan struktur masyarakat di waktu penjajahan.

Investment komunis, terutama dari Uni Soviet dan Eropa Timur tidak berarti. Berlainan dengan investment di Mesir dan Sudan, maka di negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara lainnya, misalnya di bidang perdagangan, di daerah Afrika Timur, Blok Timur hanya mencapai $1\frac{1}{2}\%$ dari perdagangan negara-negara Afrika. Partner dagang utama masih tetap Inggris dengan 40% lebih.

Lain halnya dengan RRC, Korea Utara dan Viet-Cong. Bantuan RRC sejak tahun 1970 mengalir ke Tanzania dan Zambia untuk pembangunan jalan kereta api; ke Zaire, Ethiopia. Rencana raksasa RRC, di samping pembuatan Tanzam Railway di Afrika Timur adalah pembangunan pelabuhan raksasa di Mauritania di bagian Barat Afrika. Perdagangan antara Afrika Timur dengan RRC pada tahun 1972 sudah mencapai 25% dari perdagangan seluruhnya.

Dalam bidang ideologi, ketiga negara komunis Asia menitikberatkan perhatian pada pembinaan gerakan kemerdekaan seperti Frelimo untuk Mozambik. Operasi-operasi militer diikuti dengan pembangunan desa-desa lengkap dengan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan usaha-usaha sosial lain yang diperlukan. Dapat diperkirakan bahwa rakyat yang tadinya tidak diperhatikan oleh pemerintah-pemerintah kolonial dengan pembebasan merasa diperhatikan dan karenanya berpartisipasi. Hal ini telah disaksikan oleh rombongan wartawan asing yang mengunjungi daerah-daerah bebas di Mozambik pada permulaan tahun 1973.

4. Kemerdekaan untuk daerah-daerah Portugal di Afrika

Seperti juga terjadi di negara-negara lain di Afrika, transisi dari pemerintah jajahan putih ke tangan pemerintah berkulit hitam membawa akibat bahwa penduduk-penduduk kulit putih ber-exodus ke luar. Sejak bulan April 1974, ribuan orang-orang Portugal sudah ke luar dari Mozambik dan Angola. Ada yang kembali ke Portugal, ada yang pergi ke Afrika Selatan atau ke Rhodesia. Memang hal ini merupakan akibat dari kondisi mental kulit putih yang takut akan dominasi orang hitam. Exodus ini bagi Portugal merupakan beban yang berat menampung ribuan warga negara dalam kondisi ekonomi Portugal yang mandeg.

Lain daripada itu, akan timbul persoalan mengenai ekonomi Mozambik dan Angola, yang sedianya merupakan bagian dari ekonomi Benteng Putih, dan bersatu dengan Afrika Selatan akan menjadi rakasa. Di Mozambik sedang dibangun Bendungan Sabora Bassa untuk keperluan Mozambik, Rhodesia dan Afrika Selatan. Bendungan ini sedang dibangun dengan modal Portugal, Jerman Barat dan Afrika Selatan. Sebagian besar devisa Mozambik dihasilkan karena pengangkutan barang-barang ekspor Rhodesia ke pelabuhan-pelabuhan Beira dan Lorenzo Marques di Mozambik. Apakah pemerintah Frelimo akan melanjutkan pola ekonomi tadi? Bila Frelimo merubah pola ekonomi, maka akan timbul kemiskinan dan kemelaratan yang pasti menimbulkan kegoncangan masyarakat. Bila sebaliknya Frelimo melanjutkan pola ekonomi kerjasama dengan Rhodesia dan Afrika Selatan, maka akan timbul keretakan dalam pimpinan Frelimo, yang dengan sendirinya akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan masyarakat juga.

Keadaan di Angola lebih gawat lagi, karena gerakan-gerakan kemerdekaan tidak dapat bersatu. Selanjutnya, di samping memproduksi kopi, Angola memiliki mineral dan minyak bumi yang sedang dikerjakan dengan modal Portugal, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Sampai sekarang Angola belum memasuki tahap transisi seperti di Mozambik. Bahkan, sementara itu di Mozambik pasukan-pasukan Frelimo telah memasuki kota-kota dengan ada insiden-insiden, di Angola penguasa-penguasa putih telah mengambil sikap keras yang telah mengakibatkan ribuan orang Afrika berduyun-duyun meninggalkan kota untuk mencari perlindungan di daerah-daerah.

Rupanya, Jendral Spinoza memang menulis bahwa perang di Afrika tidak akan dapat diselesaikan dengan operasi militer, akan tetapi cita-cita Jendral Spinoza masih mencakup susunan Portugal Raya dengan daerah Portugal Eropa dan daerah-daerah seberang lautan bersama-sama membentuk satu Community Lusitania.

Kenyataan menunjukkan bahwa proses dekolonisasi Portugal menurut rencana Spínola sudah ketinggalan disebabkan dengan adanya ketegangan-ketegangan dalam Junta militer Portugal, adanya pressure group kiri dan karena ketidak-ketentuan mengenai perkembangan di Mozambik dan Angola.

5. Afrika Selatan - Realitas yang bertahan

Salah satu faktor pengikat bagi semua negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara adalah tekad Afrika melawan rasialisme dan apartheid yang tetap berlaku di Afrika Selatan dan di Rhodesia. Walaupun sejak 1961 Afrika Selatan tidak menjadi anggota Commonwealth Inggris dan pada tahun 1963 PBB menentukan boikot terhadapnya, Afrika Selatan dapat bertahan, bahkan tetap berkembang dalam bidang ekonomi dan lebih memperketat peraturan-peraturan untuk melaksanakan apartheid terhadap penduduknya.

Perdana Menteri Vorster dalam rangka menanggapi dekolonisasi untuk Mozambik dan Angola menerangkan bahwa apartheid di negaranya akan tetap dilaksanakan. Bangsa putih dan bangsa hitam di Afrika Selatan akan menempuh "separate development", yang akan membawa kemajuan bagi Afrika Selatan. Ia percaya bahwa di kemudian hari, negara-negara Afrika Selatan akan mengakui realitas Afrika Selatan agar dapat hidup bersama di benua Afrika.

Dalam Sidang Umum PBB oleh negara-negara Afrika diajukan resolusi agar Afrika Selatan dikeluarkan dari PBB. Sesuai dengan tata tertib persoalan tadi diajukan kepada Dewan Keamanan PBB. Walaupun mayoritas Dewan Keamanan menyetujui resolusi pengeluaran Afrika Selatan, namun veto dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis berhasil bahwa Afrika Selatan tetap menjadi anggota PBB. Keputusan Dewan Keamanan PBB itu berarti bahwa Afrika Selatan dengan direstui oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis tetap merupakan realitas di benua Afrika. Selama Afrika Selatan melaksanakan politik apartheid dan rasialisme, selama itu negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara akan mempunyai ikatan bersama. Perlu diperhatikan bahwa persatuan negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara tidak didasarkan atas kekuatan-kekuatan ekonomi atau kesatuan strategi, melainkan didasarkan motivasi politik yang berdasarkan cita-cita anti-apartheid dan rasialisme.

Dahlan uraian di atas menggambarkan masih adanya instabilitas di bidang ekonomi, di dalam keamanan di negara masing-masing, dalam

perkembangan struktur pemerintahan menghadapi berbagai-bagai suku, dan adanya ketidak-ketentuan di Angola dan Mozambik. Semua faktor-faktor tadi menunjukkan bahwa Afrika akan bergolak terus.

6. Pengaruh pergolakan Afrika terhadap Indonesia

Bagi Indonesia peranan Afrika terasa di bidang politik, di forum-forum internasional, di mana Afrika sering ke luar dengan satu suara, yang terdiri dari lebih kurang 40 negara, baik negara-negara Arab, maupun negara hitam. Pengalaman Indonesia dalam hal Irian Barat cukup meyakinkan mengenai kohesi negara-negara Afrika.

Pergolakan sekarang yang mencakup dekolonisasi daerah-daerah Portugal di Afrika perlu diikuti dengan saksama, karena proses dekolonisasi Portugal mencakup juga Timor-Portugis. Politik pemerintahan Indonesia terhadap keinginan rakyat Timor untuk bergabung dengan Indonesia akan dipejari terus-menerus oleh pemimpin-pemimpin Afrika.

Di samping lobbying di PBB oleh Perwakilan Tetap Indonesia, perlu kiranya diadakan pencerangan melalui KERI-KERI di Afrika, untuk menggambarkan kenyataan bahwa penduduk Timor Portugis adalah sebagian bangsa Indonesia, sebagian dari suku yang berdiam di Timor Indonesia. Selanjutnya agar dapat digambarkan pola-pola pembangunan bagi daerah Timor seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan seluruh Indonesia.

Alasan-alasan bahwa Timor Portugis tidak akan dapat independen sendiri, karena penduduk sedikit, resources kurang, mungkin tidak akan diterima di Afrika, di mana ada negara-negara yang lebih kecil, lebih sedikit penduduknya, lebih kurang resourcesnya. Salah satu dasar kokoh dari Organisasi Persatuan Afrika adalah bahwa semua negara anggota OAU diakui dalam bentuk seperti berlaku pada waktu kemerdekaan. Viability - daya hidup - negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara tidak dipersoalkan, walaupun diakui bahwa di daerah Franco-phone misalnya, dua kesatuan administratif dibatalkan menjadi sejumlah negara-negara kecil. Motivasi politik Afrika Hitam, seperti digambarkan tadi, tidak selalu berdasarkan faktor-faktor ekonomis, hankam dan sebagainya, tetapi lebih didasarkan pada cita-cita anti-apartheid, anti-rasialisme dan anti-penjajahan.

Di samping peninjauan diplomatik di Lisbon, sekiranya peninjauan tentang perkembangan di Mozambik dapat bermanfaat bagi pengertian Indonesia terhadap pergolakan di Afrika.